

ANALISIS PENDEKATAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI MASALAH STUNTING DI INDONESIA

Rusliadi^{1*}, Hasriadi²

¹ Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

² Universitas Hasanuddin, Indonesia

*Korespondensi : Rusliadi@unismuh.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi collaborative governance dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Pasangkayu. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi. Kabupaten Pasangkayu dipilih karena prevalensi stunting yang tinggi dan adanya inisiatif kolaboratif antar berbagai aktor. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola kolaborasi, faktor pendukung dan penghambat, serta dinamika hubungan antar aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan collaborative governance dipengaruhi oleh kepercayaan antar aktor, komunikasi yang efektif, dan dukungan regulasi yang jelas. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, dan perbedaan kepentingan antar aktor. Studi ini juga mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam tata kelola kolaboratif yang dapat diterapkan di wilayah lain, seperti penguatan kapasitas lokal dan peningkatan keterlibatan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini mencakup pengembangan model kolaborasi yang lebih adaptif untuk konteks lokal, yang dapat digunakan sebagai panduan bagi pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan penanggulangan stunting. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori administrasi publik dengan memberikan wawasan empiris tentang implementasi tata kelola kolaboratif di sektor kesehatan masyarakat.

Kata Kunci : Collaborative Governance; Kebijakan Publik; Relevansi Stunting

ABSTRACT

This research aims to analyse the implementation of collaborative governance in stunting prevention in Pasangkayu Regency. The method used was qualitative with a descriptive approach, involving observation, in-depth interviews, and documentation analysis. Pasangkayu district was selected due to the high prevalence of stunting and the existence of collaborative initiatives between various actors. Data were analysed using thematic analysis techniques to identify patterns of collaboration, supporting and inhibiting factors, and the dynamics of relationships between actors. The results showed that the success of collaborative governance is influenced by trust between actors, effective communication, and clear regulatory support. The main barriers include limited resources, lack of coordination, and different interests between actors. The study also identified best practices in collaborative governance that can be applied in other regions, such as strengthening local capacity and increasing community involvement. The implications of this research include the development of a more adaptive collaboration model for the local context, which can be used as a guide for policymakers in optimising the stunting response. This research contributes to the development of public administration theory by providing

empirical insights on the implementation of collaborative governance in the public health sector.

Keywords : *Collaborative Governance; Public Policy; Stunting Relevance*

A. PENDAHULUAN

Pendekatan collaborative governance adalah kerangka kerja yang menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan bersama (Suwarna, 2023). Dalam konteks penanggulangan stunting, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena kompleksitas masalah yang memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah (Islamy, 2018; Rusliadi & Aina, 2024). Collaborative governance memungkinkan berbagai aktor untuk berkolaborasi secara efektif dalam mencapai tujuan bersama, dengan membangun hubungan yang saling mendukung dan berbasis pada kepercayaan (Yasintha, 2020).

Stunting merupakan permasalahan kesehatan yang kompleks dan multidimensional, yang mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitif anak serta berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan (Ajayi et al., 2017; Perkins et al., 2017). Penanganan stunting menuntut pendekatan menyeluruh yang mengintegrasikan peran pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta organisasi non-pemerintah (Pratama et al., 2024). Penanggulangan stunting membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah (Cheng et al., 2021; Damayanti & Sentosa, 2020). Dalam konteks ini, pendekatan collaborative governance menjadi relevan sebagai

kerangka kerja yang memungkinkan berbagai aktor untuk berkolaborasi secara efektif dalam mencapai tujuan bersama (Wang & Ran, 2023). Sehingga penting untuk mengkaji implementasi collaborative governance dalam penanggulangan stunting, dengan fokus pada interaksi antar aktor, dinamika kerjasama, serta hambatan dan peluang yang muncul dalam proses kolaborasi tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi konsep collaborative governance dalam berbagai konteks. Gash, (2022) dalam artikelnya "Collaborative Governance" menyoroti bahwa tata kelola kolaboratif melibatkan proses yang iteratif dan membutuhkan partisipasi aktif dari semua aktor untuk mencapai konsensus. Bianchi et al., (2021) pendekatan inovatif yang bertujuan memperkuat pemahaman kolektif atas isu dan capaian masyarakat, mendorong keterhubungan antara kebijakan layanan dengan praktik pemberian layanan, serta menyatukan perspektif layanan publik dengan perspektif kelembagaan dan antarorganisasi. Di sisi lain, Lee & Esteve, (2023) menekankan pentingnya kekuasaan, representasi, dan legitimasi dalam proses kolaborasi, yang semuanya menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan tata kelola kolaboratif.

Dalam konteks kesehatan masyarakat, penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dapat digunakan untuk mengatasi tantangan multi-sektor, seperti kemiskinan dan kesehatan anak (Mocca, 2021; Sarkar & Sensarma, 2024). Sementara itu, Lee & Esteve (2023)

menyoroti bahwa keberhasilan collaborative governance sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepercayaan antar aktor, komunikasi yang efektif, dan pengelolaan konflik. Studi-studi ini memberikan dasar yang kuat untuk mengeksplorasi penerapan collaborative governance dalam konteks penanggulangan stunting di Indonesia.

Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan disiplin administrasi publik, khususnya dalam memahami bagaimana tata kelola kolaboratif dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik (Bianchi et al., 2021). Administrasi publik modern menekankan pentingnya jaringan kolaborasi dalam mengatasi isu-isu yang kompleks, seperti stunting, yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu aktor atau institusi. Dengan menggunakan perspektif collaborative governance, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik administrasi publik, khususnya dalam konteks kebijakan kesehatan dan pembangunan manusia.

Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa collaborative governance memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik, tetapi penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi penerapannya dalam konteks penanggulangan stunting masih terbatas khususnya di daerah Kabupaten Pasangkayu. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan literatur dengan menyediakan analisis mendalam tentang bagaimana pendekatan ini diterapkan di lapangan, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Adapun keterbaruan penelitian ini adalah pengembangan model kolaborasi yang dapat diadaptasi untuk konteks penanggulangan stunting di Indonesia.

Selain itu, masih sedikit penelitian yang membahas terkait penanggulangan stunting, khususnya di Kabupaten Pasangkayu. Selain itu, penelitian ini menawarkan pandangan baru tentang bagaimana integrasi lintas sektor dan tingkat pemerintahan dapat dioptimalkan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dalam penanggulangan stunting. Pertanyaan penelitian yang diangkat dalam studi ini adalah Bagaimana implementasi collaborative governance dalam penanggulangan stunting di Indonesia?

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis implementasi collaborative governance dalam penanggulangan stunting di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, dan mengembangkan model kolaborasi yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan stunting. Hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan kolaboratif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggali secara mendalam implementasi collaborative governance dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Pasangkayu (Hardani, 2020). Adapun penelitian ini menggunakan teori Emerson et al., (2012) terkait Prinsip Bersama, motivasi bersama, kapasitas untuk melakukan tindakan bersama. Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Kabupaten Pasangkayu memiliki prevalensi stunting yang cukup rendah dibandingkan wilayah lain di Sulawesi

Barat, sehingga menjadi salah satu fokus prioritas dalam upaya penanggulangan stunting. Kedua, terdapat inisiatif kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat lokal, yang memberikan konteks yang relevan untuk mengeksplorasi implementasi collaborative governance.

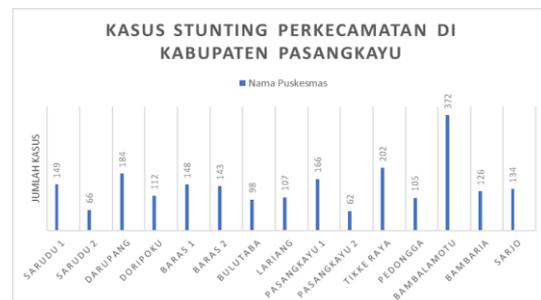
Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Agusta, 2003). Observasi dilakukan untuk memahami dinamika interaksi dan pola kolaborasi antar aktor di lapangan. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci, termasuk Tim Percepatan Penurunan stunting (TPPS) Kabupaten Pasangkayu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Penata Kependudukan dan KB, Analis Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Puskesmas, Sekretaris BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) dan Ibu hamil untuk menggali perspektif mereka terkait implementasi collaborative governance dalam penanggulangan stunting. Dokumentasi mencakup analisis dokumen-dokumen resmi, seperti laporan program, peraturan daerah, dan hasil evaluasi terkait penanggulangan stunting di Kabupaten Pasangkayu.

Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan analisis tematik guna menemukan pola-pola utama, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta dinamika hubungan antar aktor dalam proses kolaborasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber data dan metode, serta diskusi dengan para ahli untuk memastikan interpretasi data yang akurat. Analisis data yang digunakan juga menggunakan Nvivo

12 Pro (Mortelmans, 2019), untuk memvisualisasikan data yang diperoleh dari observasi, wawancara untuk mengetahui strategi dan dinamikanya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian penurunan stunting berdasarkan data dari dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu telah cukup signifikan. Berdasarkan data terbaru Dinas Kesehatan, capaian penurunan stunting di Kabupaten Pasangkayu dari mencapai jumlah 22,40 % pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam mengurangi prevalensi stunting di banding tahun sebelumnya. Selain itu, data hasil SSGI di Kabupaten Pasangkayu juga menunjukkan angka sebesar 25,77 % Tahun 2022. Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian anak di Kabupaten Pasangkayu mengalami masalah pertumbuhan yang terkait dengan kondisi kehamilan dan gagal tumbuh pada balita. Capaian penanggulangan stunting setiap Puskesmas berdasarkan data dari dinas kesehatan menunjukkan masih terdapat gizi buruk dan gizi buruk yang di temui di setiap puskesmas. Hal ini perlunya upaya pemerintah daerah, lembaga kesehatan, swasta dan masyarakat dalam meningkatkan program kesehatan dan edukasi pertumbuhan anak di Kabupaten Pasangkayu. Berikut jumlah prevalensi stunting berdasarkan Kecamatan Kabupaten Pasangkayu:

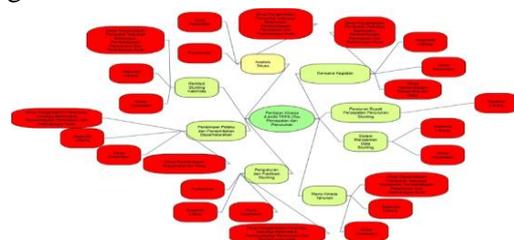


Gambar 1. Kasus Stunting Puskesmas Kabupaten Pasangkayu. Sumber: diolah oleh peneliti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu, 2023.

Sekalipun Kabupaten Pasangkayu menjadi kabupaten yang mengalami kasus paling sedikit kasus terkait stunting jika dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada di Sulawesi Barat. Namun, tentu hal ini menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk mengatasi permasalahan stunting yang ada. Dari gambar 1 diatas, dapat kita lihat bahwa dari 16 Puskesmas yang ada, wilayah Bambalamotu memiliki kasus stunting yang paling tinggi. Berdasarkan data terbaru Dinas Kesehatan, capaian penurunan stunting di Kabupaten Pasangkayu dari mencapai jumlah 22,40 % pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam mengurangi pravelensi stunting di banding tahun sebelumnya. Selain itu, data hasil SSGI di Kabupaten Pasangkayu juga menunjukkan angka sebesar 25,77 % Tahun 2022. Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian anak di Kabupaten Pasangkayu mengalami masalah pertumbuhan yang terkait dengan kondisi kehamilan dan gagal tumbuh pada balita. Capaian penanggulangan stunting setiap Puskesmas berdasarkan data dari dinas kesehatan menunjukkan masih terdapat gizi buruk dan gizi buruk yang di temui di setiap puskesmas. Hal ini perlunya upaya pemerintah daerah, lembaga kesehatan, swasta dan masyarakat dalam meningkatkan program kesehatan dan edukasi pertumbuhan anak di Kabupaten Pasangkayu.

Kondisi tersebut tidak lepas dari peran Pemerintah dan lintas sektor untuk menekan angka stunting di Kabupaten Pasangkayu. Setidaknya di Kabupaten

Pasangkayu memiliki program 8 aksi konvergensi dalam penurunan stunting secara kolaboratif yang dimiliki oleh berbagai organisasi perangkat daerah. Adapun 8 aksi tersebut tegabung dalam agenda Tim Percepatan dan Penurunan Stunting (TPPS) yang didalamnya terdiri dari Penanganan stunting dilakukan melalui serangkaian langkah terstruktur, dimulai dengan analisis situasi untuk memahami kondisi dan faktor penyebab stunting di daerah. Selanjutnya, disusun rencana kegiatan yang konkret dan terarah. Rembuk stunting menjadi wadah penting untuk menyepakati komitmen bersama lintas sektor. Pemerintah daerah kemudian menetapkan Peraturan Bupati tentang percepatan penurunan stunting sebagai landasan hukum. Selain itu, dilakukan pembinaan terhadap para pelaku serta pemerintahan desa dan kelurahan guna memperkuat kapasitas pelaksanaan program. Sistem manajemen data stunting diperkuat untuk memastikan akurasi dan integrasi data. Hasil pengukuran stunting dipublikasikan secara berkala untuk memantau perkembangan. Sebagai langkah akhir, dilakukan review kinerja tahunan untuk mengevaluasi capaian dan merumuskan perbaikan strategi ke depan.. Tentunya setiap aksi tersebut memiliki penanggung jawab masing-masing untuk memaksimalkan upaya percepatan penanggulangan stunting di Pasangkayu. Oleh karena itu untuk melihat penanggung jawab dari setiap aksi dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. 8 AKSI TPPS (Tim Percepatan dan Penurunan Stunting). Sumber: diolah oleh peneliti dari Nvivo 12 Pro, 2024.

Berdasarkan visualisasi dari gambar 2 tersebut dapat kita lihat terkait perang dan tugas masing-masing OPD dalam menanggulangi permasalahan stunting di Kabupaten Pasangkayu. Berdasarkan temuan data, collaborative governance yang tergambar dalam pola kerja dan bungan koordinasiantara anggota OPD yang masuk ke dalam TPPS (Tim Percepatan dan Penurunan Stunting) Kabupaten Pasangkayu terlihat masih memiliki beberapa kelemahan, terlepas dari angka penurunan stunting yang semakin meningkat tiap tahun. Upaya maksimal dalam konvergensi program antar-stakeholder menjadi kunci dalam penanggulangan stunting. Konvergensi ini merujuk pada tindakan kolaboratif yang dilakukan secara terpadu dan saling terhubung, baik dalam pembangunan infrastruktur kesehatan maupun dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Salah satu faktor penting yang mendorong optimalisasi peran pemerintah dalam mempercepat penurunan stunting adalah penerapan prinsip Collaborative Governance, yang mengutamakan kerja sama lintas sektor secara efektif dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, untuk melihat sejauh mana konsep collaborative governance dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Pasangkayu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Prinsip Bersama

Prinsip bersama menurut Emerson merujuk pada salah satu elemen penting dalam kerangka collaborative governance (tata kelola kolaboratif (Emerson et al.,

2012). Dalam kerangka ini, prinsip bersama (shared principle atau shared commitment) adalah elemen yang menggambarkan nilai-nilai, tujuan, atau visi yang disepakati bersama oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi.

Keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada sejauh mana prinsip bersama dapat didefinisikan, diterima, dan diterapkan oleh semua pihak (Barrane et al., 2021). Ketika prinsip bersama tidak jelas atau tidak disepakati, risiko konflik atau kegagalan kolaborasi meningkat (Keers & van Fenema, 2018). Setiap anggota Tim Percepatan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Pasangkayu terlebih dahulu mempertimbangkan sebelum terlibat dalam proses kolaborasi. Sebagai bagian dari strategi penanganan stunting, koordinasi telah dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Koordinasi ini melibatkan lintas sektor yang bertanggung jawab atas upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Pasangkayu, dengan tujuan mempermudah komunikasi serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan edukasi terkait informasi penurunan stunting. Hal ini sependapat yang disampaikan oleh (Mahyuni & Syahrin, 2021) bahwa koordinasi yang baik antara berbagai pihak sangat penting untuk memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan saling mendukung dan tidak tumpang tindih, sehingga tujuan bersama dapat tercapai dengan lebih efektif. Tanpa koordinasi yang jelas, sumber daya dapat terbuang percuma, dan hasil yang diinginkan dalam penanggulangan masalah kompleks seperti stunting sulit dicapai.

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu mengarahkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan

intervensi stunting sesuai amanat Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2021, yang mewajibkan implementasi percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota. Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2022, yang menetapkan 8 Aksi sebagai panduan pelaksanaan intervensi stunting. Dalam hal ini, Bappeda Litbang berperan sebagai koordinator untuk mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pasangkayu.

Penanggulangan stunting Kabupaten Pasangkayu merupakan urusan bersama berbagai pihak yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 kemudian tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu No 20 Tahun 2022 tentang percepatan dan penurunan stunting. Namun dalam bentuk implementasi kegiatan program kegiatan dilaksanakan masing-masing instansinya.

Pertemuan koordinasi satgas tingkat kabupaten dalam bentuk acara “Rembuk Stunting” yang difasilitasi oleh BAPPEDA Litbang (Badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan) selaku koordinator Tim/satgas. Itu satu-satunya kegiatan rutin dimana seluruh pihak dalam Tim/satgas stunting hadir bersama dan mendiskusikan capaian kinerja penanganan stunting masing-masing.

Prinsip bersama dalam penanganan stunting menjadi fondasi penting dalam tata kelola kolaboratif lintas sektor (Khuzaimah et al., 2024). Stunting yang merupakan masalah multidimensi, memerlukan sinergi dari berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan organisasi internasional (Pingault et al., 2018). Berdasarkan prinsip bersama, semua pihak dapat menyepakati visi kolektif,

seperti menurunkan prevalensi stunting dengan pendekatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagian pihak berpendapat bahwa prinsip bersama harus berakar pada komitmen terhadap inklusivitas dan partisipasi aktif masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak (Bradbury-Jones et al., 2018; Rosato et al., 2008). Pendekatan ini menekankan pentingnya melibatkan perspektif lokal dalam menyusun strategi penanganan. Namun, pihak lain lebih menekankan bahwa prinsip bersama harus berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, seperti alokasi anggaran dan pemantauan program gizi (Haufler, 2010). Pandangan ini menggarisbawahi perlunya pengawasan publik untuk memastikan implementasi yang efektif.

Proses perumusan atau penyusunan program memperlihatkan kolaborasi antar OPD dan Pemerintah yang terlibat, khususnya Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa. Peran utama dalam penyusunan program ini di landasi adanya legalitas tim percepatan dan penurunan stunting yang memiliki jabatan. Hal ini menunjukkan adanya motivasi dan nilai antar stakeholder dalam perumusan program percepatan dan penurunan stunting.

Selain itu, beberapa ahli mengusulkan bahwa prinsip bersama juga harus mencakup kolaborasi berbasis data (Susha et al., 2019). Dalam konteks ini, semua pihak sepakat untuk menggunakan data yang valid dan dapat dipercaya sebagai landasan pengambilan keputusan. Namun, tantangan muncul ketika akses terhadap data tidak merata, sehingga memerlukan penyesuaian dalam mekanisme berbagi informasi.

Dengan adanya perbedaan pendapat ini, prinsip bersama tetap menjadi pedoman penting untuk menciptakan harmoni dalam kerjasama lintas sektor. Sebuah prinsip yang disepakati, seperti komitmen terhadap kesejahteraan anak, dapat menjadi perekat yang menyatukan berbagai kepentingan, sekaligus memastikan bahwa upaya penanganan stunting berjalan secara efektif dan terarah.

Terkait dengan pencapaian target penurunan stunting, pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah aktif memberikan dedikasi dan mengajak semua pihak ikut berkontribusi menekan penurunan stunting dengan membentuk tim percepatan dan penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Bupati No 20 Tahun 2022 tentang percepatan dan penurunan stunting. Hal ini adalah salah satu bentuk upaya yang diambil oleh Pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mengoptimalkan kolaborasi dalam penanggulangan stunting. Penetapan tim percepatan dan penurunan stunting, rutin melaksanakan rapat koordinasi mengenai stunting di desa lokus tingginya angka stunting di wilayah tersebut. Pelaksanaan rapat koordinasi membahas 8 aksi konvergensi dilakukan baik itu dengan kegiatan ke Pemerintahan maupun kegiatan masyarakat dengan harapan agar tim percepatan dan penurunan stunting lebih termotivasi melaksanakan 8 aksi program konvergensi stunting.

b) Motivasi Bersama

Motivasi bersama dalam penanganan stunting menjadi landasan penting untuk menyatukan berbagai pihak yang terlibat dalam mencapai tujuan kolektif (Sukanti & Faidati, 2021), yaitu menurunkan angka stunting demi menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. Kesadaran akan dampak negatif jangka panjang stunting,

baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi, menjadi pendorong utama terbentuknya dorongan kolektif ini (Ekayanthi & Suryani, 2019; Kholida, 2024). Semua pihak, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat, hingga komunitas lokal, terdorong untuk bekerja sama karena menyadari bahwa stunting adalah masalah multidimensi yang membutuhkan solusi kolaboratif.

Penurunan prevalensi stunting dalam jangka waktu tertentu, menjadi pengikat yang memperkuat semangat bersama. Selain itu, kepercayaan dan komitmen antar pemangku kepentingan berperan penting dalam menciptakan lingkungan kolaborasi yang harmonis (Rampersad et al., 2010). Penghargaan atas keberhasilan yang diraih secara bersama juga dapat meningkatkan semangat untuk terus berkontribusi (Kressler, 2003). Dengan pendekatan lintas sektor, motivasi bersama ini diwujudkan dalam bentuk tindakan konkret, seperti program edukasi, pengawasan, dan implementasi kebijakan yang berorientasi pada hasil nyata di masyarakat.

Edukasi dan peningkatan kesadaran publik juga menjadi bagian penting dalam membangun motivasi bersama. Dengan memahami pentingnya peran mereka, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam mendukung program-program penanganan stunting, seperti menjaga pola asuh yang baik, meningkatkan akses terhadap gizi seimbang, dan memanfaatkan layanan kesehatan. Motivasi bersama ini menjadi kekuatan utama yang memastikan bahwa upaya penanganan stunting dapat dilakukan secara berkelanjutan, efektif, dan menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi generasi mendatang.

Para aktor, pihak, atau OPD yang tergabung dalam tim percepatan dan

penurunan stunting Kabupaten Pasangkayu saling menghargai dan memahami perbedaan pendapat di antara mereka. Hal ini berkaitan dengan interaksi interpersonal yang terjadi, baik antar individu maupun antar OPD, yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan yang terbentuk di antara mereka. Perbedaan pendapat antar individu justru menjadi hal yang penting dalam menemukan solusi yang memuaskan, terutama dalam memilih kegiatan atau merumuskan program untuk penanggulangan stunting. Pendekatan ini dapat mempengaruhi kinerja tim percepatan dan penurunan stunting di Kabupaten Pasangkayu. Komponen pemahaman bersama antar stakeholder terwujud melalui saling memahami dan menghargai berbagai pendapat yang ada.

Selain itu, kredibilitas juga dapat diukur dari sejauh mana setiap stakeholder yang terlibat mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, apakah sudah sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2021 atau Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2022 mengenai percepatan dan penurunan stunting, dan diterapkan secara bersama-sama atau belum. Dengan demikian, kolaborasi antar stakeholder dapat berjalan sesuai harapan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kredibilitas masing-masing pihak, karena mereka mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik dan tanpa pelanggaran. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan berkontribusi pada tercapainya hasil yang lebih memuaskan dalam proses pengambilan keputusan yang kompleks dalam penanggulangan stunting.

c) Kapasitas untuk Melakukan Tindakan Bersama

Kapabilitas untuk melakukan

tindakan bersama merupakan kemampuan kolektif yang dimiliki oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kolaborasi untuk bekerja secara terkoordinasi dan efektif guna mencapai tujuan bersama (Arrozaaq, 2016). Dalam hal ini, kapabilitas tersebut sangat penting karena memungkinkan berbagai aktor, seperti pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, untuk menyatukan sumber daya dan pengetahuan mereka dalam rangka menyelesaikan masalah bersama, seperti penanggulangan stunting. Kapabilitas ini memastikan bahwa setiap pihak dapat berkontribusi sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing, serta bekerja dengan harmonis untuk hasil yang maksimal.

Salah satu aspek utama dari kapabilitas untuk bertindak bersama adalah komunikasi yang efektif (Ratna, 2019). Tanpa komunikasi yang jelas, kolaborasi dapat terhambat, karena masing-masing pihak mungkin tidak memahami tujuan, peran, atau langkah-langkah yang harus diambil (Suter et al., 2009). Komunikasi yang terbuka dan transparan membantu menciptakan pemahaman bersama, memastikan bahwa informasi penting dapat disampaikan dengan tepat waktu, dan masalah atau hambatan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diatasi (Farrell, 2016). Dengan demikian, komunikasi yang efektif menjadi kunci untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat memperlambat atau merusak proses kolaborasi.

Selain itu, koordinasi yang baik juga merupakan komponen penting dari kapabilitas untuk melakukan tindakan Bersama (Gundolf & Jaouen, 2005). Koordinasi memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh stakeholder saling mendukung dan tidak tumpang

tindih. Dalam penanganan masalah seperti stunting, koordinasi antara berbagai sektor dan tingkat pemerintahan dari desa hingga kabupaten sangat penting agar strategi yang diterapkan berjalan secara sinergis (Permanasari et al., 2020). Tanpa koordinasi yang baik, berbagai inisiatif yang dilakukan oleh setiap pihak bisa menjadi tidak efektif atau bahkan kontraproduktif.

Terakhir, komitmen yang kuat dari setiap pihak yang terlibat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kolaborasi (Ardiansyah et al., 2023). Komitmen ini mencakup kesiapan untuk menyumbangkan sumber daya, tenaga, waktu, dan keahlian yang diperlukan dalam tindakan Bersama (Frank et al., 2000). Dalam penanggulangan stunting, misalnya, setiap pemangku kepentingan harus memiliki komitmen untuk melaksanakan peran mereka dengan penuh tanggung jawab, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi (Goodstein & Wicks, 2007). Selain itu, kapabilitas ini juga memerlukan sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran, teknologi, maupun tenaga ahli (Bharadwaj, 2000). Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, tindakan bersama menjadi sulit dilakukan dan hasil yang diharapkan tidak dapat tercapai.

Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama dalam penanggulangan stunting dapat diartikan sebagai kesediaan kapabilitas oleh masing-masing Stakeholder yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Untuk itu dalam mencapai tujuan dalam menjalankan program 8 Aksi, diperlukan kapabilitas tentang sumberdaya, ataupun proses yang ada dilapangan yang terjadi. kapabilitas dibagi secara strategis

dan terstruktur dan operasional setiap stakeholder untuk mencapai tujuan bersama sehingga memungkinkan untuk mengambil keputusan yang baik.

Adapun dalam upaya penanggulangan stunting OPD yang tergabung dalam tim percepatan dan penurunan stunting penting memiliki kapabilitas agar intervensi penurunan stunting cepat dan efektif dan dapat berjalan dengan baik. dengan adanya kapabilitas atau berbagi informasi yang dilakukan masing-masing stakeholder memberikan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh OPD yakni kemudahan mengetahui perkembangan penurunan stunting. Dalam hal ini, apabila 8 Aksi dilaksanakan OPD yang menjadi penanggung jawab untuk intervensi stunting di lokasi tertentu, maka stakeholder yang bertugas menyampaikan informasi kepada OPD lain.

Kasus penurunan stunting adalah contoh nyata dari upaya kolektif yang melibatkan berbagai sektor untuk mengatasi masalah gizi buruk yang berdampak jangka panjang pada perkembangan fisik dan kognitif anak. Stunting merupakan kondisi pertumbuhan tubuh yang terhambat, ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dibandingkan standar usianya. Masalah ini umumnya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis yang terjadi selama periode 1.000 hari pertama kehidupan, yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Di banyak negara, termasuk Indonesia, stunting menjadi masalah besar yang mempengaruhi masa depan generasi muda dan menghambat potensi pembangunan sosial-ekonomi (Organization, 2018; Sitorus, 2024). Penurunan stunting memerlukan tindakan komprehensif yang melibatkan perbaikan akses dan kualitas

gizi, pendidikan kepada orang tua, peningkatan layanan kesehatan, serta perbaikan sanitasi dan air bersih.

Pemerintah Indonesia meluncurkan program nasional untuk penurunan stunting dengan pendekatan konvergensi yang mengintegrasikan berbagai program di sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sosial. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta (Rusliadi et al., 2023). Di beberapa daerah, seperti Kabupaten Pasangkayu di Sulawesi Barat, upaya kolaboratif ini telah menunjukkan hasil yang positif dengan adanya penurunan prevalensi stunting. Misalnya, tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pasangkayu mengoptimalkan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memastikan pelaksanaan program sesuai dengan regulasi yang ada, seperti Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2021. Koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat setempat menjadi kunci keberhasilan inisiatif ini.

Namun, meskipun ada kemajuan yang dicapai, tantangan tetap ada dalam mengurangi stunting secara signifikan. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan dalam menjangkau daerah terpencil dan minimnya fasilitas kesehatan atau sumber daya yang memadai di beberapa wilayah. Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan makan yang tidak sehat masih menjadi masalah, sehingga edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, upaya penurunan stunting harus dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis data, dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar efektif dan dapat mengatasi akar

penyebab stunting dalam jangka panjang.

D. KESIMPULAN

Pendekatan collaborative governance dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Pasangkayu memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penerapan "Prinsip Bersama" dalam tata kelola kolaboratif untuk penanggulangan stunting di Kabupaten Pasangkayu telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pembentukan TPPS (Tim Percepatan dan Penurunan Stunting), yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 dan kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu No. 20 Tahun 2022 mengenai percepatan dan penurunan stunting.

Penerapan "Motivasi Bersama" di antara para stakeholder yang terlibat dalam tata kelola kolaboratif penanggulangan stunting di Kabupaten Pasangkayu telah terwujud dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat kepercayaan dan pemahaman antar aktor kolaboratif (OPD anggota TPPS), di mana setiap pihak telah memiliki Surat Keputusan (SK) jabatan yang mengikat sebagai tanggung jawab untuk menjalankan peran dan berkontribusi dalam upaya penurunan stunting, selaras dengan delapan aksi program organisasi yang telah dirancang.

Penerapan "Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama" di Kabupaten Pasangkayu telah memberikan hasil yang menggembirakan. Hal ini terlihat dari penurunan angka stunting yang cukup signifikan, berdasarkan data SSGI (Studi Status Gizi Indonesia), yang mencatatkan angka 25,77 persen pada tahun 2022 dan

turun menjadi 22,44 persen pada tahun 2023 menurut laporan terbaru dari Dinas Kesehatan. Penurunan ini menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Pasangkayu berhasil mengurangi angka stunting sebesar 3 persen setiap tahunnya, hasil dari kolaborasi yang efektif antar pihak yang terlibat.

Implikasi penelitian mengenai kolaborasi governance dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Pasangkayu menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kebijakan, praktik kolaboratif, dan arah penelitian di masa depan. Penelitian ini memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan yang ada, terutama terkait dengan kolaborasi lintas sektor dalam menangani stunting. Temuan mengenai pentingnya komunikasi yang efektif, koordinasi yang baik, serta komitmen semua pihak dalam menjalankan tanggung jawab mereka dapat dijadikan acuan untuk memperkuat kebijakan dan meningkatkan efektivitas program penanggulangan stunting di tingkat kabupaten. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya praktik kolaborasi antar stakeholder, dengan menekankan perlunya kesepahaman yang mendalam antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk bekerja sama secara sinergis. Dalam jangka panjang, implikasi penelitian ini juga membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut yang dapat menggali faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap keberhasilan program penurunan stunting, seperti pengaruh pendidikan gizi atau akses terhadap layanan kesehatan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berdampak pada kebijakan dan praktik yang ada, tetapi juga memberikan wawasan baru untuk upaya penanggulangan stunting

yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agusta, I. (2003). Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27(10), 179–188.
- Ajayi, O. R., Matthews, G. B., Taylor, M., Kvalsvig, J. D., Davidson, L., Kauchali, S., & Mellins, C. (2017). Structural equation modeling of the effects of family, preschool, and stunting on the cognitive development of school children. *Frontiers in Nutrition*, 4, 17.
- Ardiansyah, F. W., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2023). Analisis Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 741–756.
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo). Universitas Airlangga.
- Barrane, F. Z., Ndubisi, N. O., Kamble, S., Karuranga, G. E., & Poulin, D. (2021). Building trust in multi-stakeholder collaborations for new product development in the digital transformation era. *Benchmarking: An International Journal*, 28(1), 205–228.
- Bharadwaj, A. S. (2000). A resource-based perspective on information

- technology capability and firm performance: an empirical investigation. *MIS Quarterly*, 169–196.
- Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W. C. (2021). Implementing collaborative governance: models, experiences, and challenges. *Public Management Review*, 23(11), 1581–1589. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777>
- Bradbury-Jones, C., Isham, L., & Taylor, J. (2018). The complexities and contradictions in participatory research with vulnerable children and young people: A qualitative systematic review. *Social Science & Medicine*, 215, 80–91.
- Cheng, Z., Wang, H., Xiong, W., Zhu, D., & Cheng, L. (2021). Public–private partnership as a driver of sustainable development: toward a conceptual framework of sustainability-oriented PPP. *Environment, Development and Sustainability*, 23(1), 1043–1063. <https://doi.org/10.1007/s10668-019-00576-1>
- Damayanti, D. A., & Sentosa, S. U. (2020). Analisis Kausalitas Stunting, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan* <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/article/view/12641>
- Ekayanthi, N. W. D., & Suryani, P. (2019). Edukasi gizi pada ibu hamil mencegah stunting pada kelas ibu hamil. *Jurnal Kesehatan*, 10(3), 312–319.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Farrell, M. (2016). Transparency. *Journal of Library Administration*, 56(4), 444–452.
- Frank, F., Smith, A., & King, K. (2000). *The partnership handbook*. Human Resources Development Canada Ottawa.
- Gash, A. (2022). Collaborative governance. In *Handbook on theories of governance* (pp. 497–509). Edward Elgar Publishing.
- Goodstein, J. D., & Wicks, A. C. (2007). Corporate and stakeholder responsibility: Making business ethics a two-way conversation. *Business Ethics Quarterly*, 17(3), 375–398.
- Gundolf, K., & Jaouen, A. (2005). Patterns and coordination of collective action in small and very small business: the case of a tourist village in the Pyrenees. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 2(4), 392–403.
- Hardani. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif*. In Cv. Pustaka Ilmu Group.
- Haufler, V. (2010). Disclosure as governance: The extractive industries transparency initiative and resource management in the developing world. *Global Environmental Politics*, 10(3), 53–73.
- Keers, B. B. M., & van Fenema, P. C. (2018). Managing risks in public-private partnership formation projects. *International Journal of Project Management*, 36(6), 861–875.

- Kholida, N. A. (2024). Dampak Stunting Anak Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin di Kecamatan Karangmojo Gunungkidul. Universitas Islam Indonesia.
- Khuzaimah, A., Kurniati, U., & Haq, M. Z. (2024). Collaborative governance in stunting interventions at the local level. *Tamalanrea: Journal of Government and Development (JGD)*, 1(3), 39–51.
- Kressler, H. (2003). *Motivate and reward: Performance appraisal and incentive systems for business success*. Springer.
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative governance konsep dan aplikasi*. Deepublish.
- Lee, S., & Esteve, M. (2023). What drives the perceived legitimacy of collaborative governance? An experimental study. *Public Management Review*, 25(8), 1517–1538.
- Mahyuni, M., & Syahrin, M. N. (2021). Sister city cooperation model in wetland environmental governance: case study in Banjarmasin, south of Kalimantan. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*, 1(02), 115–125.
- Mocca, E. (2021). Collaborative Governance: Opening the Doors of Decision-Making. In *Partnerships for the Goals* (pp. 162–171). Springer.
- Mortelmans, D. (2019). Analyzing Qualitative Data Using NVivo. In *The Palgrave Handbook of Methods for Media Policy Research* (pp. 435–450). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16065-4_25
- Organization, W. H. (2018). 2018 Global reference list of 100 core health indicators (plus health-related SDGs). [apps.who.int. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259951/WHO-HIS-IER-GPM-2018.1-eng.pdf)
- Perkins, J. M., Kim, R., Krishna, A., McGovern, M., Aguayo, V. M., & Subramanian, S. V. (2017). Understanding the association between stunting and child development in low-and middle-income countries: Next steps for research and intervention. *Social Science & Medicine*, 193, 101–109.
- Permanasari, Y., Permana, M., Pambudi, J., Rosha, B. C., Susilawati, M. D., Rahajeng, E., Triwinarto, A., & Prasodjo, R. S. (2020). Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 30(4), 315–328.
- Pingault, N., Caron, P., El Solh, M., Cole, M., Fresco, L. O., Godoy-Faúndez, A., Kadleciková, M., Kennedy, E., Khan, M., & Li, X. (2018). Multi-stakeholder partnerships to finance and improve food security and nutrition in the framework of the 2030 Agenda. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security.
- Pratama, A. Y., Andri, S., Yuliani, F., & As'ari, H. (2024). Collaborative Governance Strategies To Accelerate Stunting Handling In Kampar District. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(4), 2008–

- 2016.
- Rampersad, G., Quester, P., & Troshani, I. (2010). Examining network factors: commitment, trust, coordination and harmony. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 25(7), 487–500.
- Ratna, H. (2019). The importance of effective communication in healthcare practice. *Harvard Public Health Review*, 23, 1–6.
- Rosato, M., Laverack, G., Grabman, L. H., Tripathy, P., Nair, N., Mwansambo, C., Azad, K., Morrison, J., Bhutta, Z., & Perry, H. (2008). Community participation: lessons for maternal, newborn, and child health. *The Lancet*, 372(9642), 962–971.
- Rusliadi, R., & Aina, A. N. (2024). Social Welfare Policy and Cross-Sectoral Participation: For Resilience Overcoming Stunting in Indonesia. *Government & Resilience*, 2(1), 1–13.
<https://doi.org/10.62503/gr.v2i1.10>
- Rusliadi, R., Widianingsih, I., & Buchari, R. A. (2023). Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Takalar Regency. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik*, 13(1), 359–370.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jiap.v13i1.47257>
- Sarkar, S., & Sensarma, R. (2024). Confluence of Health and Financial Policies for Development: A Study of Collaborative Governance in Maternal Health Delivery. *International Journal of Public Administration*, 47(9), 612–633.
- Sitorus, N. L. (2024). The Significance of Tackling Stunting for The Economic Prosperity of A Nation—A Narrative Review. *Journal of Indonesian Specialized Nutrition*, 2(2), 16–22.
- Sukanti, S., & Faidati, N. (2021). Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Sleman. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 91–113.
- Susha, I., Grönlund, Å., & Van Tulder, R. (2019). Data driven social partnerships: Exploring an emergent trend in search of research challenges and questions. *Government Information Quarterly*, 36(1), 112–128.
- Suter, E., Arndt, J., Arthur, N., Parboosingh, J., Taylor, E., & Deutschlander, S. (2009). Role understanding and effective communication as core competencies for collaborative practice. *Journal of Interprofessional Care*, 23(1), 41–51.
- Suwarna, R. (2023). Collaborative Governance dalam Menciptakan Branding Kota Surakarta Sebagai Kota Festival. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 160–184.
<https://doi.org/10.26618/kjap.v9i2.10846>
- Wang, H., & Ran, B. (2023). Network governance and collaborative governance: A thematic analysis on their similarities, differences, and entanglements. *Public Management Review*, 25(6), 1187–1211.
- Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1–23.